

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bagian ini menjelaskan lebih jauh mengenai objek dari penelitian yang dikaji yaitu Solidaritas Masyarakat Adat Boti di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

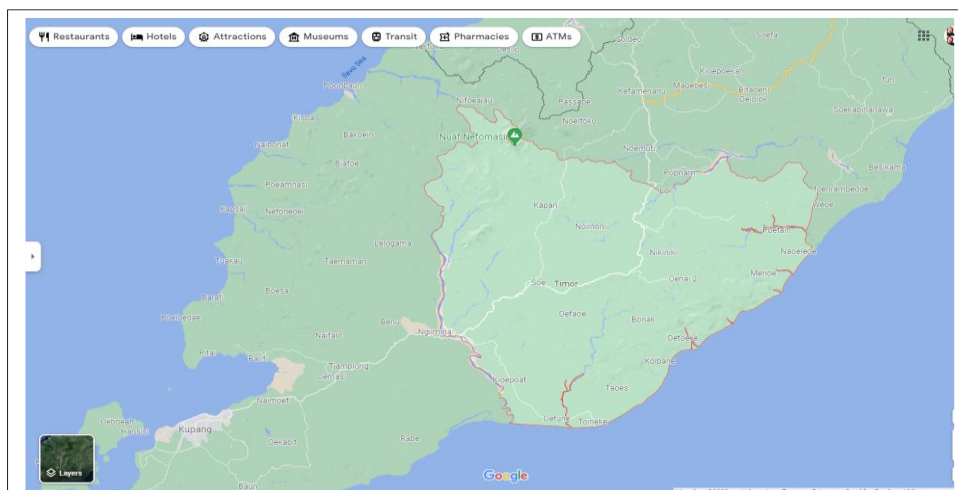
4.1.1 Kondisi Demografi Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masyarakat Adat Boti selanjutnya peneliti sebut dengan (Orang Boti) berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana provinsi ini berbatasan dengan Laut Flores di Utara; di Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Australia; di bagian Timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Boti sendiri di sebelah Utara berbatasan dengan dua desa lainnya, Desa Oenlasi dan Desa Napi. Sedang di bagian Selatan dengan Haunobenak dan Desa Babui. Untuk di sebelah Barat dengan dua desa yaitu Desa Naekpumeck dan Desa Baki. Di wilayah Timur dengan Bele dan Neilmesek.

Masyarakat adat yang bertempat tinggal di Desa Boti di Kecamatan Ki'e menempati setidaknya 17 kilometer persegi luas tanah. Dengan empat (4) dusun yang menempati desa Boti, yang terdiri dari sembilan (9) rukun warga dan sembilan belas (19) (BPS TTS, 2021, pp. 2-3).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Survei Pendataan Potensi Desa (Pondes) 2020, wilayah desa Boti sendiri berada pada ketinggian 523 mdpl yang artinya wilayah ini berada didarat berbukit yang cukup terjal menjadikan wilayah mereka rawan longsor. Struktur tanah yang kurang stabil membuat jalur transportasi menjadi sulit. Untuk jarak antara

desa Boti dengan kecamatan (Ki'e) 21 kilometer, sedangkan ke kabupaten (Timor Tengah Selatan-So'e) berjarak 45 kilometer (BPS TTS, 2021, p. 4). Wilayah Boti sendiri berdasarkan data yang dimiliki Stasiun Klimatologi Kupang tidak mendapatkan curah hujan yang tinggi baik bulan Indonesia maupun sampai dengan Desember di tahun 2020 (BPS TTS, 2021, p.5). Dengan kondisi wilayah yang kurang air, lahan pertanian mereka kebanyakan di tanami asam dan kemiri sebagai komoditi untuk di jual ke luar. Sedangkan jagung dan umbi-umbian yang menjadi makanan pokok Orang Boti.

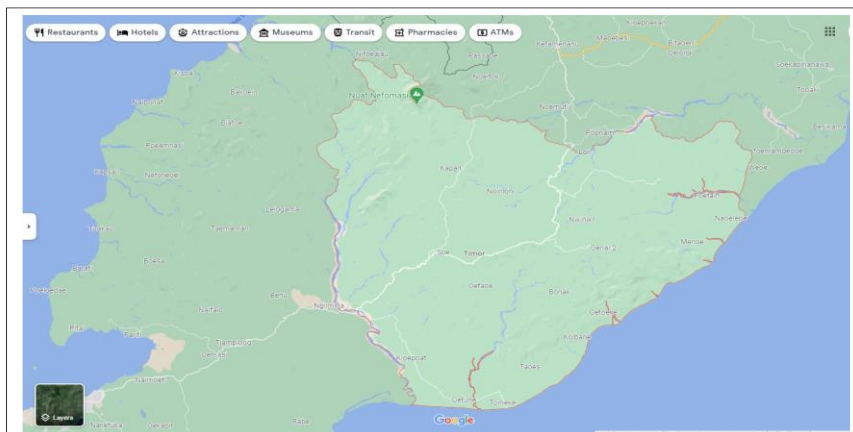


Gambar 4.1 Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur

Sumber: Google Maps (2022)

([https://www.google.com/maps/place/South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-](https://www.google.com/maps/place/South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-9.8018505,124.2131156,10z/data=!4m5!3m4!1s0x2c55f73cbdf18729:0xdf3a46dd147b1025!8m2!3d-9.7762816!4d124.4198243)

[9.8018505,124.2131156,10z/data=!4m5!3m4!1s0x2c55f73cbdf18729:0xdf3a46dd147b1025!8m2!3d-9.7762816!4d124.4198243](https://www.google.com/maps/place/South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-9.8018505,124.2131156,10z/data=!4m5!3m4!1s0x2c55f73cbdf18729:0xdf3a46dd147b1025!8m2!3d-9.7762816!4d124.4198243))

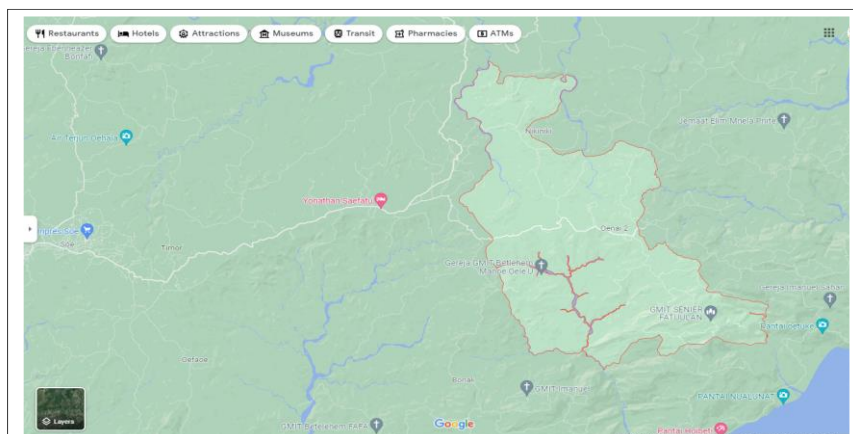


Gambar 4.2 Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

Sumber: Google Maps (2022)

([https://www.google.com/maps/place/South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-](https://www.google.com/maps/place/South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-9.8222806,124.1572315,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2c55f73cbdf18729:0xdf3a46dd147b1025!8m2!3d-9.7762816!4d124.4198243)

[9.8222806,124.1572315,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2c55f73cbdf18729:0xdf3a46dd147b1025!8m2!3d-9.7762816!4d124.4198243](https://www.google.com/maps/place/South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-9.8222806,124.1572315,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2c55f73cbdf18729:0xdf3a46dd147b1025!8m2!3d-9.7762816!4d124.4198243)

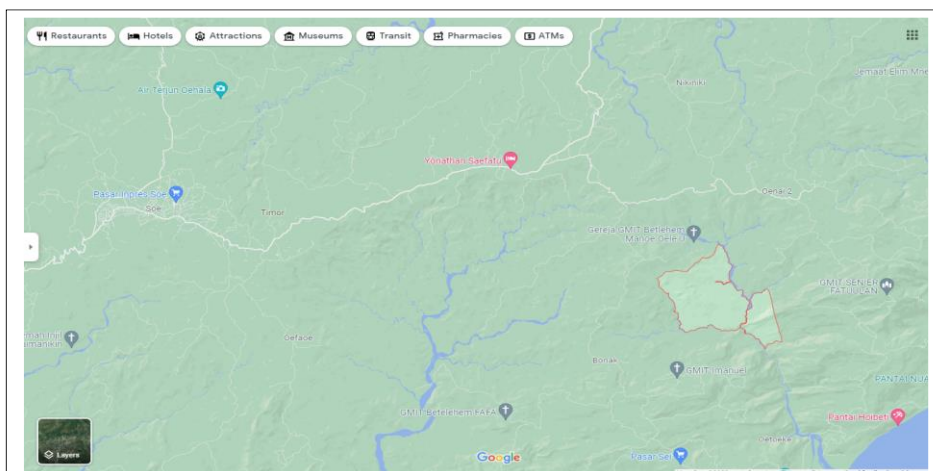


Gambar 4.3 Peta Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

Sumber: Google Maps (2022)

([https://www.google.com/maps/place/Kie,+South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-](https://www.google.com/maps/place/Kie,+South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-9.8435801,124.4876319,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2c55f7799d547dab:0xde8f315da6c6fd97!8m2!3d-9.8587803!4d124.5306837)

[9.8435801,124.4876319,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2c55f7799d547dab:0xde8f315da6c6fd97!8m2!3d-9.8587803!4d124.5306837](https://www.google.com/maps/place/Kie,+South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-9.8435801,124.4876319,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2c55f7799d547dab:0xde8f315da6c6fd97!8m2!3d-9.8587803!4d124.5306837))



Gambar 4.4 Peta Wilayah Boti Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

Sumber: Google Maps (2022)

(<https://www.google.com/maps/place/Boti,+Kie,+South+Timor+Tengah+Regency,+East+Nusa+Tenggara/@-9.9056301,124.4982287,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2cff566d79042dab:0x86b16ecfccc75a12!8m2!3d-9.9105638!4d124.536223>)

Tabel 1.1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Desa di Kecamatan Ki'E, 2020
Total Area and Number of Islands by Village in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Ibukota Desa Capital of Village	Luas ¹ (km ²) Total Area ¹ (square.km)
(1)	(2)	(3)
01. Fatuulan	Fatuulan	8,81
02. Tesi Ayofanu	Tesi Ayofanu	10,04
03. Belle	Belle	10,36
04. Nekmese	Nekmese	14,38
05. Boti	Boti	17,69

Catatan/Note: -

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan/Statistics of Timor Tengah Selatan Regency Regency

Gambar 4.5 Luas Daerah dan Jumlah pulau Menurut Desa di Kecamatan Ki'e, 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan (2021)

Tabel 2.1.1 Jumlah Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut Desa di Kecamatan Ki'e, 2020
Number of Sub-Villages, Community Associations, Neighborhood Associations in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Dusun Sub-Village	Rukun Warga Community Association	Rukun Tetangga Neighborhood Association
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Fatuulan	4	8	16
02. Tesi Ayofanu	3	12	24
03. Belle	4	8	16
04. Nekmese	4	8	16
05. Boti	4	9	19

Catatan/Note: -

Sumber/Source: Kantor Kecamatan Ki'E/Ki'E Subdistrict Office

Gambar 4.6 Jumlah Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut Desa di Kecamatan Ki'e, 2020

Sumber: Kantor Kecamatan Ki'e (2021)

4.1.2 Falsafah Hidup Orang Boti

Dalam beberapa literatur telah dijelaskan mengenai bagaimana cara hidup Orang Boti. Nino Mailani dalam bukunya Kearifan Lokal Masyarakat Boti pun buku Eksplorasi Budaya Suku Boti: Mereka yang Menjaga Konstruksi Alam oleh Rais Ropa dan Rista Damayanti telah menjelaskan apa falsafah atau dasar hidup Orang Boti.

Pada dasarnya Orang Boti berdomisili atau bertempat tinggal di desa adat Boti, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Namun kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan baik dengan sengaja maupun tidak, seperti migrasi-transmigrasi, perkawinan, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya muncul Boti Dalam atau Boti Halaika dan Boti Luar atau Boti Nasrani. Sebutan untuk Boti Dalam ditujukan kepada mereka yang bertempat tinggal di wilayah adat itu sendiri. Sedangkan Boti Luar adalah kepada mereka

yang merupakan Orang Boti namun bertempat tinggal di luar wilayah desa adat mereka (Mailani, 2021, p.3,4,13).

Orang Boti merupakan bagian dari Suku *Atoni Pah Meto* (Atoin Meto) yang mana merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku ini meliputi Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan (TTS), Timur Tengah Utara (TTU) dan masyarakat adat Boti berada di Kabupaten TTS. Sedikit berbeda dari masyarakat adat Suku Atoni Pah Meto di daerah lainnya, masyarakat Boti dengan teguh mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal warisan para leluhur (Wuli, 2021).

Corak khas dari masyarakat adat Boti adalah kosmosentris yang menjadi paradigma atau pandangan dari orang-orang Boti. Secara umum atau mudahnya kosmosentris menganggap bahwa alam adalah sakral dan suci. Sehingga semua tempat, benda, tumbuhan, air, batu, dan lain sebagainya dipercaya memiliki kekuatan spiritual (gaib). Pandangan hidup kosmosentris menyaratkan adanya hidup berdampingan karena ada keselarasan dan hidup saling membutuhkan, harmoni yang seimbang dengan alam (Wuli, 2021).

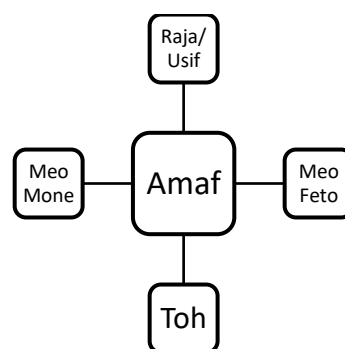
Ini yang mungkin juga mempengaruhi kepercayaan Orang Boti pada umumnya bahwa alam dikendalikan oleh *Uis Neno* yang lebih kepada pemberkatan dalam bentuk makanan untuk segala bentuk kehidupan. Oleh karena itu Orang Boti masih terus mempertahankan untuk mengadakan upacara-upacara adat seperti upacara panen, upacara kelahiran anak, upacara tanam, dan lainnya sebagai bentuk pemujaan untuk menjaga relasi dengan *Uis Neno*. Ritual/ upacara juga memegang peran sangat penting untuk mempertahankan dan merajut solidaritas sosial kolektif masyarakat adat Boti (Wuli, 2021).

Mayoritas Orang Boti masih memegang teguh kepercayaan terhadap *Uis Pah* atau Dewa Bumi dan *Uis Neno* atau Dewa Langi. Hal ini menjadikan Orang Boti menjaga, merawat, dan melestarikan alam sehingga mereka bisa memiliki hidup yang aman dan tenteram serta sejahtera. Bagi Orang Boti, *Uis Pah* diartikan sebagai Ibu sedangkan *Uis*

Neno adalah Bapak atau Ayah. Secara filosofisnya dianggap sebagai Ibu karena sebagai pengatur, mengawasi, serta menjaga kehidupan bagi alam semesta. Sedangkan Bapak atau Ayah merupakan penentu bagi mereka yang akan masuk surga maupun tidak dinilai dari perilakunya selama didunia (Mailani, 2021, p.4).

Orang Boti juga menganggap leluhur yang telah meninggal atau disebut dengan *Nitu*, masih hidup dan masih berinteraksi dengan mereka melalui ritual-ritual yang masih dijaga. Hubungan ini bukan hanya sekedar untuk pemujaan atau pun interaksi, namun juga untuk menjaga norma-norma tentang hubungan/ relasi di dunia (Wuli, 2021).

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Orang Boti dipimpin oleh seorang raja (*Usif*) dan dibantu oleh tokoh lainnya (*Amaf-Amaf*). Selain *Amaf*, *Usif* juga dibantu oleh *Meo Mone* dan *Meo Feto*. Pejabat *Amaf* dipegang oleh marga *Suli* dan *Neolaka* serta dibantu oleh marga *Senu*. *Meo Mone* memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan dari kerajaan Boti. Atau dengan kata lain memiliki tingkatan yang sejajar dengan panglima tentara dalam sebuah negara. Oleh karena itu *Meo Feto* memiliki tugas yang sama dengan tentara. Orang yang menduduki jabatan sebagai *Meo Mone* secara langsung dipilih atau diteruskan kepada mereka yang memiliki marga *Bota*, *Benu*, dan *Nesimnasi*. Sedangkan untuk *Meo Feto* diwariskan kepada marga *Lasi* dan *Benu*. *Meo Feto* sendiri memiliki tugas yang mirip dengan *Meo Mone* yang “disetarakan” dengan Polisi suatu negara (Mailani, 2021, pp. 9-11).



Gambar 4.7 Bagan Stratifikasi Sosial Orang Boti

Sumber: Nino Melkias Meilani (2021)

Stratifikasi sosial di Kerajaan Boti kurang lebih sama dengan masyarakat kerajaan etnis Dawan di Pulau Timor. Struktur masyarakatnya berdasarkan kemurnian darah atau genealogis dari keturunan leluhur pertama yang membuka daerah atau pendiri kerajaan. Dengan kata lain yang hubungan darahnya dengan pendiri pertama kerajaan mendapatkan stratifikasi atau pelapisan sosial tertinggi (Meilani, 2021, p. 9).

Untuk pelapisan atau stratifikasi sosial Orang Boti didasarkan oleh tiga macam kelas yaitu berdasarkan ekonomis, politis, dan berdasarkan jabatan tertentu dalam masyarakat. Hubungan ketiga stratifikasi ini saling berhubungan erat dan terikat. Biasanya yang memiliki kedudukan atau masuk dalam lapisan politis juga memiliki andil dalam lapisan ekonomi. Namun hal ini tidak menjadi kepastian karena bisa mengalami perubahan menyesuaikan dengan dinamika sosial atau dengan sistem nilai yang dianut (Mailani, 2021, p. 9).

Stratifikasi pada Orang Boti bisa mengalami perubahan naik maupun turun strata karena beberapa alasan seperti pernikahan, peran/ andil/ jasa seseorang bagi komunitas, dan pelanggaran hukum adat. Pernikahan yang terjadi antara kalangan bangsawan dengan wanita yang lebih rendah stratanya akan mempengaruhi strata si pria. Selain itu turunnya strata seseorang juga bisa karena pelanggaran hukum adat atau dengan kata lain melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tergantung besar atau beratnya kesalahan yang dilakukan. Namun perubahan naik strata juga bisa terjadi apabila seseorang memiliki jasa yang besar bagi masyarakat. Orang tersebut akan diangkat menjadi bangsawan, dinikahkan dengan wanita dari kalangan bangsawan. Perubahan stratifikasi sosial ini telah mengalami pergeseran seiring dengan modernisasi yang terjadi secara global membawa nilai-nilai baru dalam masyarakat Boti maupun pada umumnya (Mailani, 2021, p. 11).

Pada sektor ekonominya Orang Boti masih menganut sistem yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki Boti diandalkan

dalam kegiatan sehari-hari terutama untuk pekerjaan berat seperti beternak, berkebun, bahkan hanya kaum laki-laki yang bisa mengikuti upacara adat. Kaum perempuannya cenderung melakukan kegiatan memasak, mengasuh anak, menenun, bertani-berkebun saat masa panen tiba, dan memberi makan ternak. Meski secara 'teori' pekerjaan laki-laki dan perempuan dibedakan, namun pada praktiknya mereka saling membantu untuk dalam kegiatan sehari-hari (Mailani, 2021, pp. 12-15).

Prinsip hidup Orang Boti adalah hidup sederhana dengan kerja keras. Mereka memiliki semboyan hidup '*meup on le ate, tah on le usif*' yang artinya adalah *bekerja seperti hamba, makan seperti raja*. Ini berimbasa pada cara mereka hidup yang dekat dengan kerja keras dan kemandirian sehingga mereka tidak suka menerima bantuan dari pemerintah terutama jika berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti pangan contohnya beras miskin (raskin). Dengan pedoman hidup seperti itu Orang Boti merasa cukup dengan hasil kebun, tani, dan ternak mereka. Sandang yang mereka gunakan merupakan hasil tenunan para perempuan Boti. Untuk berteduh atau rumah juga dibuat dengan masih memanfaatkan hasil alam pohon Siwalan atau Lontar dan beratapkan *seng* maupun dengan daun Alang-Alang atau daun Lontar yang dikeringkan. Meski begitu beberapa penduduk di Boti Dalam juga telah menggunakan atau mendirikan tembok (bata). Namun jumlahnya tidak banyak dan biasanya bukan penduduk atau tidak termasuk Orang Boti Dalam (Mailani, 2021, pp. 14-16).

Dalam menjalani hidup, Orang Boti bukan hanya memiliki semboyan hidup *meup on le ate, tah on le usif*, namun juga berpedoman pada kalender yang mereka buat sendiri. Kalender ini lebih kepada penerapan hari selama 'seminggu'. Satu putaran 'minggu-an' Orang Boti terdiri dari sembilan (9) hari. Diawali dengan Hari Api (*Neon Ai*), diikuti dengan Hari Air (*Neon Oe*), Hari Besi (*Neon Besi*), Hari Dewa Bumi dan Dewa Langit (*Neon Uis Pah Ma Uis Neno*), Hari Perselisihan (*Neon Suli*), Hari Berebutan (*Neon Masikat*), Hari Besar (*Neon Indonesia*), Hari Anak-Anak (*Neon Li'ana*), dan diakhiri dengan Hari Istirahat (*Neon Tokos*) (Mailani, 2021, pp. 22-24).

Oleh Orang Boti secara filosofis, Api dianggap sebagai lambang penerang karena dimaknai sebagai suatu hal yang cerah dan terang, juga sebagai sarana persembahan. Sedangkan secara praktis hari ini kemudian digunakan Orang Boti untuk menggunakan Api dalam hal-hal yang berkaitan dengan tradisi maupun kegiatan sehari-hari. Meski memiliki pemaknaan yang baik penggunaannya tetap harus dengan bijak (Mailani, 2021, p. 22).

Hari Air tentu menurut Orang Boti merupakan hari yang baik untuk menggunakan air yang secara filosofis lekat dengan kehidupan yang mana Dewa Air (*Uis Oe*) memberikan anugerahnya untuk kehidupan Orang Boti. Sedangkan Hari Besi dimanfaatkan untuk penggunaan barang-barang yang berbahan besi. Alat-alat dengan bahan dasar besi dikeramatkan pada hari ini seperti tombak, pedang, parang, dan sebagainya. Untuk Hari Dewa Bumi dan Langit lebih untuk pemujaan atau ritual untuk mendapatkan berkah kesuburan bagi makhluk hidup kepada Dewa Bulan dan Dewa Langit (Mailani, 2021, p. 23).

Orang Boti juga memiliki Hari Perselisihan yang dianggap sangat tebat untuk menyelesaikan perselisihan baik yang terjadi antara individu maupun kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwa Orang Boti tetap memiliki atau terjadi perbedaan pandangan sehingga menyebabkan renggangnya hubungan mereka. Oleh karena itu rekonsiliasi-rekonsiliasi dan mediasi biasanya dilakukan pada hari ini untuk menyelesaikan perselisihan yang ada (Mailani, 2021, p. 23).

Norma-norma atau adat yang di pegang oleh Orang Boti sangat berperan penting untuk mengatur relasi sosial dan budaya masyarakat seperti struktur sosial masyarakat Boti dari tingkat tertinggi *usif* (raja/bangsawan), *amaf* (pemegang tingkat adat), *too* (rakyat jelata), dan *ate* (budak, orang-orang terhukum). Meskipun ada stratifikasi sosial, namun relasi dan solidaritas sosial terajut dalam harmoni (Wuli, 2021).

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Angka-Angka di Boti, Kecamatan Ki'e dalam 2021

Peneliti mendapatkan data-data di bawah di ambil dari berbagai sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, Puskesmas Ki'e, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kantor Kecamatan Ki'E, Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan, Stasiun Klimatologi Kupang, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Ada pun data yang diperoleh sebagai berikut:

Berbicara tentang pandemi Covid-19, maka kita berbicara tentang bencana yang melanda dunia tak terkecuali Orang Boti itu sendiri. Namun selebihnya di lihat dari data data yang diberikan oleh BPS, Boti sendiri tidak terkena bencana alam yang demikian rupa ditahun 2020-2021. Sehingga tidak didapatkan data adanya korban jiwa akibat bencana alam yang melanda Boti (BPS TTS, 2022, pp. 61-66).

Sedang dari data yang didapatkan melalui Puskesmas Ki'e, jumlah sarana kesehatan menurut desa di kecamatan ini, untuk desa Boti sendiri Hanya ada satu (1) puskesmas pembantu dan empat (4) pos pelayanan terpadu (posyandu). Selain itu rumah sakit umum, khusus, bersalin, puskesmas rawat inap dan tidak, klinik, apotek, pos kesehatan desa (poskesdes), dan polindes, tidak ditemukan di desa Boti ini. Sedangkan untuk kemudahan mencapai sarana kesehatan terdekat untuk desa yang tidak ada sarana kesehatan, desa Boti termasuk yang sulit untuk mencapai sarana kesehatan ini. Bahkan masuk pada kategori sangat sulit untuk rumah sakit bersalinnya (BPS TTS, 2022, pp. 44-49).

Masih dari sumber yang sama Banyaknya Warga Penderita Gizi Buruk Menurut Desa di Kecamatan Ki'e 2018-2019 maka kita bisa ketahui bahwa tidak ada warga atau masyarakat yang mengidap gizi buruk di wilayah Boti. Data menunjukkan berapa jumlah warga yang mengidap gizi buruk di tahun 2018-2019 sebelum adanya pandemi di Indonesia.

Sayangnya untuk periode 2020-2021 data akan penyandang gizi buruk belum ada (BPS TTS, 2022, p 55).

Untuk masalah sosial keagamaan sendiri dilihat dari data, di Boti sendiri memang hanya ada lima (5) gereja Protestan dan satu (1) gereja Katolik. Namun untuk penganut keagamaan yang dicantumkan dalam indikator (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buda, dan lainnya) tidak ada. Rohaniawan terait dengan agama yang dicantumkan juga tidak ada (BPS TTS, 2022, pp. 56-58). Untuk Pendidikan sendiri, desa Boti tidak memiliki pendidik maupun sekolah taman kanak-kanak (BPS TTS, 2022, pp. 22-24). Namun untuk jenjang sekolah dasar, desa ini memiliki tiga (3) sekolah, dua (2) sekolah negeri dan satu (1) swasta. Dengan dua puluh tiga (23) guru negeri dan tujuh (7) guru swasta. Adapun murid yang bersekolah tiga ratus empat puluh enam (346) siswa (BPS TTS, 2022, pp. 25-27). Untuk pendidikan menengah pertama, desa Boti hanya memiliki satu sekolah negeri dengan delapan (8) pengajar dan seratus dua puluh enam (126) siswa (BPS TTS, 2022, pp. 29-31).

Tabel 4.3.6 Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Ki'e, 2020
Number of Natural Disasters by Village and Types of Natural Disasters in Ki'E Subdistrict, 2020

Lanjutan Tabel/Continued table 4.3.6

Desa Village	Gempa Bumi Earthquake	Tsunami	Gumung Meletus Volcanic eruption	Tanah Longsor Landslide	Lanjutan Tabel/Continued table 4.3.6				Desa Village	Kebakaran Hutan dan Lahan Forest Fire	Angin Pusyuh/Puting Belung/ Topan Whirlwind/ Tornado/ Typhoon	Gelombang Pasang Laut Ocean Tides
					Desa Village	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash flood	Kekeringan Drought				
01. Fatuulan	-	-	-	-	01. Fatuulan	-	-	-	01. Fatuulan	-	-	-
02. Tesi Ayofanu	-	-	-	-	02. Tesi Ayofanu	-	-	-	02. Tesi Ayofanu	-	-	-
03. Belle	-	-	-	-	03. Belle	-	-	-	03. Belle	-	-	-
04. Nekmese	-	-	-	-	04. Nekmese	-	-	-	04. Nekmese	-	-	-
05. Boti	-	-	-	-	05. Boti	-	-	-	05. Boti	-	-	-

Catatan/Note: -
Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020/BPS, Village Potential Data Collection 2020

Gambar 4.8 Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) (2020)

Tabel 4.3.7
Table 4.3.7
Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Ki'E, 2020
Number of Victims due to Natural Disasters by Village and Types of Natural Disasters in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Gempa Bumi Earthquake	Tsunami	Gumung Meletus Volcanic eruption	Tanah Longsor Landslide	Lanjutan Tabel/Continued table 4.3.7				Lanjutan Tabel/Continued table 4.3.7			
					Desa Village	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash flood	Kekeringan Drought	Desa Village	Kebakaran Hutan dan Lahan Forest Fire	Angin Puyuh/ Puting Beliung/ Topan Whirlwind/ Tornado/ Typhoon	Gelombang Pasang Laut Ocean Tides
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(6)	(7)	(8)	(1)	(9)	(10)	(11)
01. Fatuulan	-	-	-	-	01. Fatuulan	-	-	-	01. Fatuulan	-	-	-
02. Tesi Ayofanu	-	-	-	-	02. Tesi Ayofanu	-	-	-	02. Tesi Ayofanu	-	-	-
03. Belle	-	-	-	-	03. Belle	-	-	-	03. Belle	-	-	-
04. Nekmese	-	-	-	-	04. Nekmese	-	-	-	04. Nekmese	-	-	-
05. Boti	-	-	-	-	05. Boti	-	-	-	05. Boti	-	-	-

Catatan/Note: -

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020/BPS, Village Potential Data Collection 2020

Gambar 4.9 Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) (2020)

Tabel 4.2.2
Table 4.2.2
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Ki'E, 2020
Number of Health Facilities by Village in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Rumah Sakit Umum General Hospital	Rumah Sakit Khusus Special Hospital	Rumah Sakit Bersalin Maternity Hospital	Desa Village	Puskesmas Public Health Center		Puskesmas Pembantu Subsidiary of Public Health Center	Apotek Pharmacy	Desa Village	Klinik/Balok Kesehatan Clinic/ Health Center	Poskesdes Village Health Post	Polindes Village Maternity	Poyandu Maternal & Child Health Center
					Rawat Inap Inpatient	Tanpa Rawat Inap Without Inpatient							
01. Fatuulan	-	-	-	01. Fatuulan	-	-	1	-	01. Fatuulan	-	-	-	5
02. Tesi Ayofanu	-	-	-	02. Tesi Ayofanu	-	-	-	-	02. Tesi Ayofanu	-	1	-	3
03. Belle	-	-	-	03. Belle	-	1	-	-	03. Belle	-	-	-	3
04. Nekmese	-	-	-	04. Nekmese	-	-	-	-	04. Nekmese	-	-	-	3
05. Boti	-	-	-	05. Boti	-	-	1	-	05. Boti	-	-	-	4

Catatan/Note: -

Sumber/Source: Puskesmas Ki'E/Community Health Center of Ki'E

Gambar 4.10 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: Puskesmas Ki'e (2021)

Tabel 4.2.3
Table 4.2.3
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Ki'E, 2020
Ease of Reaching the Closest Health Facilities for Villages without Health Facilities by Village and Types of Health Facilities in the Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Rumah Sakit Umum ¹ General Hospital ¹	Rumah Sakit Bersalin ² Maternity Hospital ²	Puskesmas ³ Public Health Center ³		Lanjutan Tabel/Continued table 4.2.3			Lanjutan Tabel/Continued table 4.2.3				
			Rawat Inap Inpatient	Tanpa Rawat Inap Without Inpatient	Desa Village	Puskesmas Pembantu ⁴ Supporting Public Health Center ⁴	Rumah Bersalin ⁵ Maternity Home ⁵	Tempat Praktik Bidan ⁶ Midwife clinic ⁶	Desa Village	Poskesdes ⁷ Village Health Post ⁷	Polindes ⁸ Village Maternity ⁸	Apotek ⁹ Pharmacy ⁹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(6)	(7)	(8)	(1)	(9)	(10)	(11)
01. Fatuulan	3	4	3	3	01. Fatuulan	-	3	3	01. Fatuulan	3	3	3
02. Tesi Ayofanu	3	4	3	3	02. Tesi Ayofanu	-	3	3	02. Tesi Ayofanu	-	3	3
03. Belle	3	4	3	3	03. Belle	3	3	3	03. Belle	3	3	3
04. Nekmese	3	4	3	2	04. Nekmese	3	3	3	04. Nekmese	3	3	3
05. Boti	3	4	3	3	05. Boti	-	3	3	05. Boti	3	3	3

Catatan/Note: ¹ = Sangat Mudah/Very Easy² = Mudah/Easy³ = Sulit/Difficult⁴ = Sangat Sulit/Very Difficult

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020/Village Potential Data Collection 2020

Gambar 4.11 Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) (2020)

Tabel 4.2.9 Banyaknya Warga Penderita Gizi Buruk Menurut Desa di Kecamatan Ki'E, 2018-2019
Table **4.2.9** *Number of Residents with Malnutrition by Village in Ki'E Subdistrict, 2018-2019*

Desa <i>Village</i>	2018	2019
(1)	(2)	(3)
01. Fatuulan	...	-
02. Tesi Ayofanu	...	2
03. Belle	...	-
04. Nekmese	...	1
05. Boti	...	-

Catatan/Notes: -

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019-2020/BPS, Village Potential Data Collection 2019-2020

Gambar 4.12 Banyaknya Warga Penderita Gizi Buruk Menurut Desa di Kecamatan Ki'e 2018-2019

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019-2020 (2021)

Tabel 2.3.1 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Desa (juta rupiah) di Kecamatan Ki'E, 2020
Table **2.3.1** *Budget and Realization by Village (million rupiah) in Ki'E Subdistrict, 2020*

Desa <i>Village</i>	Pendapatan <i>Budget</i>	Belanja <i>Realization</i>
(1)	(2)	(3)
01. Fatuulan	1 523	1 393
02. Tesi Ayofanu	1 517	1 516
03. Belle	1 578	1 605
04. Nekmese	1 588	1 614
05. Boti	1 553	1 583

Catatan/Notes: -

Sumber/Source: Badan Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kab. TTS/ Community Government Agency and Village Government District TTS

Gambar 4.13 Pendapatan dan Belanja Pemerinta Desa (juta rupiah) di Kecamatan Ki'e, 2020

Sumber: Badan Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kab. TTS (2021)

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Datang dan Pindah Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ki'E, 2020
Table Number of Population Migration by Village in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Datang Moving In		Pindah Moving Out	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Fatuulan	---	---	---	---
02. Tesi Ayofanu	---	---	---	---
03. Belle	---	---	---	---
04. Nekmese	---	---	---	---
05. Boti	---	---	---	---

Catatan/Notes: -

Sumber/Source: Kantor Kecamatan Ki'E/Ki'E Subdistrict Office

Gambar 4.14 Jumlah Penduduk Datang dan Pindah Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: Kantor Kecamatan Ki'e (2021)

Desa Village	Sekolah Schools			Guru Teachers			Murid Students		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Fatuulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Tesi Ayofanu	1	-	-	---	---	---	---	---	---
03. Belle	-	1	-	---	---	---	---	---	---
04. Nekmese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Boti	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan/Note: -

Sumber/Source: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan/Public Educational and Cultural Service of Timor Tengah Selatan Regency

Gambar 4.15 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak Menurut Desa di Kecamatan Ki'e 2020/ 2021

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timor Tengah Selatan (2021)

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Agama yang Dianut di Kecamatan Ki'E, 2020
Population by Village and Religion in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Islam Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Fatuulan
02. Tesi Ayofanu
03. Belle
04. Nekmese
05. Boti

Catatan/Note: -

Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan/Ministry of Religious Affairs of Timor Tengah Selatan Regency

Gambar 4.16 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Agama yan Dianut di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: Indonesia Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan (2021)

Tabel 4.3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Ki'E, 2020
Number of Religious Service Places by Each Religions and Village in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik ¹ Catholic Church ¹	Pura Temple	Wihara Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Fatuulan	-	-	5	-	-	-
02. Tesi Ayofanu	-	-	5	-	-	-
03. Belle	-	-	4	-	-	-
04. Nekmese	1	-	4	-	-	-
05. Boti	-	-	5	1	-	-

Catatan/Note: -

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020/BPS, Village Potential Data Collection 2020

Gambar 4.17 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: BPS, Pendataan Poensi Desa (Pondes) (2020)

Tabel 4.3.3 Jumlah Rohaniwan Menurut Agama dan Desa di Kecamatan Ki'E, 2020
Table 4.3.3 Number of Religious Leaders/Clergy by Each Religions and Village in Ki'E Subdistrict, 2020

Desa Village	Islam Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Fatuulan	---	---	---	---	---	---
02. Tesi Ayofanu	---	---	---	---	---	---
03. Belle	---	---	---	---	---	---
04. Nekmese	---	---	---	---	---	---
05. Boti	---	---	---	---	---	---

Catatan/Note: -
 Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan/Ministry of Religious Affairs of Timor Tengah Selatan Regency

Gambar 4.18 Jumlah Rohaniwan Menurut Agama dan Desa di Kecamatan Ki'e 2020

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan (2021)

4.2.2 Strategi Masyarakat Boti Menghadapi Bencana Pandemi Covid-19

Bencana pandemi Covid-19 memaksa semua orang harus mengurangi kegiatan berkerumun untuk mengurangi risiko penularan virus Covid. Ini tentu berdampak pada tatanan ekonomi, sosial, bahkan politik suatu negara. Seperti yang telah di jelaskan dalam bab tinjauan pustaka-teorisasi, bahwa dalam sebut literatur disebutkan bahwa ketahanan sosial adalah bagaimana cara sebuah komunitas mampu bertahan dalam perubahan kondisi ekstrim yang berdampak pada sistem ekonomi, sosial, dan politik akibat satu dan lain hal seperti perang, atau bencana alam hebat, atau pandemi.

Dalam masa pandemi masyarakat adat Boti masih bisa berkegiatan dengan normal seperti halnya sebelum tadanya pandemi Covid-19. Ketika

pandemi diumumkan 'resmi' memasuki Indonesia, Orang Boti dengan cepat langsung menutup perbatasan dan akses masuk wilayah mereka. Mengingat kawasan/ wilayah/ desa mereka kerap menjadi sasaran wisatawan baik domestik maupun internasional. Dengan begitu sampai dengan tengah tahun 2020 mereka tidak terdampak Covid-19 dari sisi kesehatan. Dalam 'isolasinya' Orang Boti merasa tidak ada perbedaan karena mereka menganggap bahwa 'pengabaian' telah didapatkan sejak dulu kala.

Mereka tidak repot memikirkan bagaimana bantuan-bantuan pemerintah untuk mereka. Terbukti dengan survei yang telah dilakukan AMAN bahwa setidaknya enam bulan, terhitung dari Agustus 2021, Orang Boti masih bisa berdaulat untuk pangan mereka sendiri. Ini didapatkan dari bertani, mencari makan dari hutan, dan ternak. Kemandirian pangan ini juga di dukung dengan 'bantuan' Program Kedaulatan Pangan AMAN yang mendorong pemuda Boti untuk kembali ke Boti Dalam untuk menggerakkan lebih lagi sektor tani dan ternak (Hidyat, 2022).

Kegiatan sosial seperti ritual keagamaan, diskusi dan evaluasi dengan rasa/ *Usif* juga masih terlaksana dengan baik. Ini bisa tetap dilakukan bukan hanya karena wilayah mereka yang berada di 'tengah' hutan, namun juga karena mereka menutup perbatasan, tidak mengizinkan orang masuk maupun keluar dari Boti Dalam. Kaitannya dengan Covid-19, meski mereka percaya bahwa ini merupakan kehendak *Uis* namun mereka tetap menghargai pemerintah dengan terus menjaga protokol kesehatan. Bahkan mereka juga tidak menolak terhadap vaksinasi Covid-19.

Untuk masalah politik sendiri memang sudah terdapat kendala sejak dahulu kala akibat dari UU Kehutanan dan tanah ulayat atau wilayah adat yang ditepati sejak ribuan tahun lalu. Menurut AMAN setidaknya ada 157 Orang Boti yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ini berpengaruh dalam proses politik dan kependudukan itu sendiri. Namun pada dasarnya Orang Boti tidak anti pemerintahan. Mereka sangat taat dan menghormati pemerintah daerah maupun pusat.

Orang Boti masih melakukan evaluasi dan advokasi terhadap hak-hak mereka di pemerintah daerah dengan baik dan taat. Orang Boti memang tidak memiliki lembaga adat layaknya di Dayak maupun Baduy. 'Lembaga adat Boti' tidak terstruktur dan muncul karena kebutuhan penyelesaian konflik, sengketa, dan pengambilan keputusan. Sehingga mereka dasarnya terjalin karena *connection* atau ikatan. Mereka, Orang Boti saling terkait dan menjadi kolektif seiring berjalannya waktu ratusan tahun, dan 'lembaga adat' ini terbentuk dengan perwakilan tiap marga. Hal yang sama berlaku pada hukumnya, semua diyakini karena telah turun menurun sejak dahulu. Seperti halnya hukuman bagi pencuri, atau menebang pohon, dan sebagainya.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah didapatkan penulis mengategorikan sesuai dengan pertanyaan penelitian, untuk kemudian akan dianalisis dalam bagian pembahasan. Oleh karena itu pada sub bab ini akan dikelompokkan data penelitian untuk 'mengisi' pertanyaan bagaimana masyarakat adat merajut/ memperkuat solidaritas dalam rangka membangun ketahanan sosial, serta pada bagian bagaimana masyarakat adat Boti membangun ketahanan sosial pada kondisi pandemi berdasarkan solidaritas.

Dalam menjawab pertanyaan bagaimana masyarakat adat merajut/ memperkuat solidaritas dalam rangka membangun ketahanan sosial, ada banyak hal yang menjadi fondasi Orang Boti mampu mencapai solidaritas yang sangat baik. Antara lain adalah karena Orang Boti masih mempertahankan kepercayaan *Halaika* yang telah turun menurun yang ini berkaitan dengan Indonesia yang mereka percaya yaitu *Uis Pah* dan *Uis Neno*. Bahkan dalam rangka untuk mempertahankan keyakinan ini Orang Boti mempercayai bahwa, mereka yang mempercayai agama lain seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan kepercayaan lainnya maka orang tersebut harus keluar dari Boti.

Hal tersebut juga di sebutkan dalam tulisan Pradana dan Damayanti (2019) dan wawancara dengan Yayan Hidayat bahwa ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari kepercayaan dan budaya mereka sendiri (Hidayat, 2022; Pradana dan Damayanti, 2019). Kemudian dalam rangka untuk melanggengkan paham dan keyakinan ini menurut Hidayat (2022) yang memegang peran penting adalah para tetua atau kemudian yang sebut dengan raja/ *usif*. Ini juga dituliskan dalam buku laporan penelitian Pradana dan Damayanti (2019) bahwa raja merupakan titisan atau jelmaan dari *Uis Pah* atau penguasa alam. Sehingga mereka sangat menghormati dan meyakini apa yang menjadi perintah atau aturan raja.

Kemudian dalam rangka untuk merajut solidaritas di dalam masyarakat, mereka juga masih memegang teguh ritual-ritual yang mereka percaya sebagai bentuk rasa syukur, permohonan, dan komunikasi kepada Indonesia maupun leluhur mereka. Terbukti dengan masih banyaknya ritual yang dilakukan seperti saat akan menanam di sawah, menebang pohon, meminta berkah dalam bentuk hujan maupun lainnya, saat sakit, dan ritual lain sebagainya. Hal ini juga diakui dalam wawancara dengan Hidayat (2022) dan dalam buku Pradana dan Damayanti (2019).

Bukan hanya merajut ikatan secara batin atau kedekatan 'spiritual' namun mereka nyatanya juga kerap melakukan musyawarah bersama dengan raja atau tetua Boti. Ini dilakukan pada Hari Kesembilan atau disebut dengan Hari Istirahat (*Neon Tokos*) (Mailani, 2021, p. 24). Hari kesembilan ini oleh Pradana dan Damayanti (2019) disebutkan sebagai hari yang penuh dengan ketenangan, keharmonisan dan kebahagiaan. Biasanya Orang Boti tidak melaksanakan aktivitas (yang maksudnya bersinggungan dengan pekerjaan) pada hari ini. Orang Boti memanfaatkan *Neon Tokos* untuk berkunjung ke *Usif* untuk mendiskusikan banyak hal atau bahkan melakukan evaluasi pada kegiatan selama hari-hari sebelumnya.

Hal ini juga di akui oleh Hidayat dalam wawancara kami, bahwa Orang Boti sangat semangat dan rajin untuk melakukan diskusi dan evaluasi. Menurut Hidayat, masyarakat adat Boti yang tergabung dalam

AMAN tiap tiga bulan sekali selalu melaporkan hasil evaluasi baik kegiatan adat mereka maupun yang kaitannya dengan advokasi hak-hak adat mereka kepada pemerintah (Hidayat, 2022).

Dalam rangka untuk masih menjaga an menjalin solidaritas mereka, Orang Boti yang bersekolah di luar juga selalu di ajak untuk kembali ke Boti untuk merawat dan menjaga Boti. Meskipun mereka ‘terpapar’ pandangan luar (modern) namun tokoh-tokoh adat selalu masih terbuka dan merangkul kembali mereka. Bahkan dari pihak AMAN juga memberikan ‘bantuan’ dengan menginisiasi Sekolah Adat untuk melakukan filter dan ‘kontrol’ agar internalisasi budaya luar (modern) tidak makin mengikis adat di Boti (Hidayat, 2022).

Kemudian bagian bagaimana masyarakat adat Boti membangun ketahanan sosial pada kondisi pandemi berdasarkan solidaritas terjawab dengan beberapa hal, yaitu;

Saat pandemi Covid-19 dinyatakan masuk ke Indonesia, tidak lama kemudian mereka langsung menutup akses keluar masuk wilayah mereka, membuat pos penjagaan, mengutus orang untuk menjaga perbatasan. Mereka mengurangi interaksi dengan orang luar Boti Dalam. Hal ini di akui oleh Hidayat dalam wawancara kami bahwa semenjak pandemi, akses untuk ke desa Boti/ Boti Dalam lebih sulit dan rumit, tidak seperti masa-masa sebelum pandemi (Hidayat, 2022).

Kemudian untuk bertahan hidup kaitannya dengan pangan, tentu mereka mengandalkan alam. Seperti data yang didapatkan dari BPS bahwa desa Boti mayoritasnya adalah petani dan ternak, sedang lainnya (terutama perempuan) menenun. Sehingga mereka mampu ‘bertahan hidup’ lebih lama dibanding mereka yang mengandalkan barang produksi industri. Ini di akui dalam tulisan Mailani (2021), Pradana dan Damayanti (2019), dan wawancara dengan Hidayat (2022). Dalam tulisan Pradana dan Damayanti (2019) bahkan dijelaskan dengan detail bagaimana cara Orang Boti ketika akan mendirikan rumah, menebang pohon, dan membuka kebun.

Keputusan mereka untuk menutup perbatasan dengan cepat membawa keuntungan lain yaitu membuat mereka tetap dapat bekerja Indonesia biasa (bertani dan ternak) sehingga mereka tidak kesulitan untuk mencari makan. Bahkan lebih dari itu mereka masih bisa membantu sesamanya ketika sedang kesulitan. Hidayat (2022) juga menegaskan bahwa pandemi tidak membuat warga Boti kemudian tidak bekerja. Karena mereka memiliki lading sendiri atau mengolah lading/ sawah milik orang lain/ pemerintah/ swasta, mereka masih memiliki pasokan makanan untuk dikonsumsi. Selain makanan mereka juga memanfaatkan alam untuk kegunaan lain seperti sabun, sikat gigi dan pasta gigi.

4.4 Interpretasi Data

Berdasarkan pada pemaparan dari pengumpulan dan pengolahan data maka pada proses interpretasi data ini peneliti melakukan proses penggabungan hasil penelitian dengan teori dan konsep yang telah peneliti tentukan dalam rangka untuk melakukan pembahasan di sub bab berikutnya.

a. Dalam Perspektif Keamanan Manusia/ *Human Security*

Seperti yang telah peneliti tentukan bahwa konsepsi keamanan individu tahu *human security* menjadi barang penting dalam konsepsi keamanan nasional, dengan indikator utamanya adalah tentang hak-hak individu dalam menghadapi potensi ancaman (Ikenberry dkk., 2006). Menurut PBB adapun fungsi dari keamanan manusia ada empat yaitu; koordinasi-integrasi; mempromosikan kemitraan multi-pemangku kepentingan; lokalisasi dan 'tidak meninggalkan siapa pun'; serta pencegahan dan ketahanan (The Human Security Unit, 2021). Kaitannya dengan masyarakat adat Boti adalah dalam penerapan keamanan manusia yang harus memajukan respons komprehensif dalam mengatasi penyebab dan konsekuensi dari tantangan yang kompleks, yakni pandemi Covid-19,

dimana harus ada tindakan terpadu di antara jaringan pemangku kepentingan.

Masyarakat adat Boti telah menunjukkan bahwa mereka dari para 'lembaga adatnya' sampai dengan rakyatnya memiliki suara yang sama dalam menghadapi Covid-19. Bahkan mereka juga menerima anjuran pemerintah dan lembaga internasional, terkait protokol kesehatan. Sikap Orang Boti dalam menghadapi pandemi juga berkaitan dengan bagaimana mereka menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan. Kemudian kaitanya dengan indikator selanjutnya bahwa memmanifestasikan '*Indonesia one left behind*' slogan internasional untuk tidak meninggalkan siapa pun. Dimana Orang Boti masih terus bisa melakukan kegiatan sosial (kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan) tanpa ada yang ditinggalkan. Ke-kolektifan mereka masih terjaga walau di saat pandemi dengan masih adanya ritual-ritual, rapat evaluasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga pada indikator keempat dalam membangun pencegahan dan ketahanan, Orang Boti bisa menekan dampak bahkan memperkuat kapasitas lokal untuk membangun ketahanan, serta mempromosikan solusi yang meningkatkan kohesi sosial.

b. Dalam Perspektif Kebutuhan Dasar Manusia: Abraham Maslow

Kemudian penulis dapat menerjemahkan dari data yang didapat bahwa Orang Boti telah memenuhi kebutuhan dasar hidupnya jika dilihat menggunakan Teori Kebutuhan Abraham Maslow. Dimana Maslow membuat piramida kebutuhan berdasarkan paling dasar sampai paling puncak, dari keputusan psikologis (bernafas, makan, air, seks, tidur, dan sebagainya) yang ini telah 'disediakan' oleh alam bagi Orang Boti. Kemudian kebutuhan akan keamanan (tubuh, pekerjaan, sumber daya, moral, keluarga, kesehatan) dan kebutuhan rasa dimiliki, yang ini telah terjaga sejak ribuan tahun melalui ikatan darah (marga), ritual-ritual keagamaan dan budaya. Sedang kebutuhan dihargai (harga diri, percaya

diri, saling menghormati) juga didapatkan dari aturan hukum tak tertulis pada Orang Boti yang telah turun menurun ribuan tahun. Terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri (moralitas, kreativitas, pemecahan masalah, tidak ada penghakiman, menerima fakta) juga sudah di capai oleh Orang Boti (Dalam) dimana mereka bahkan menghormati dan 'memuliakan pencuri'. Meski terdapat garis yang jelas antara pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, namun tidak ada hal yang menjadi sulit untuk dilakukan Orang Boti.

c. Dalam Perspektif Teori Peran

Pada interpretasi selanjutnya dengan didasari Teori Peran, dari Orang Boti dibuktikan bahwa para tetua adat atau juga *Usif* dan pemangku 'jabatan' menjalankan peran sebagai mana mestinya peran yang mereka emban. *Usif* atau raja memiliki peran penting dalam mengatur dan mengontrol rakyatnya. *Usif* sangat dihormati dan disegani oleh Orang Boti. Ia dianggap sebagai 'jelmaan' dari *Uis Neno* dan *Pah Tuaf* atau Tuan Tanah. *Usif* disebutkan selalu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada rakyatnya, kebijakan yang diambil juga selalu berpedoman pada nilai kepercayaan leluhur yang sudah turun menurun. Hal tersebut membuat Orang Boti (rakyat) menjadi percaya kepada *Usif*.

Apa yang terjadi di Boti ini membuktikan bahwa memang peran dapat memberikan koneksi ke orang lain dan akses ke sumber daya, memberikan rasa aman, dan sikap lainnya yang berfungsi untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan kesejahteraan. Ikatan 'kepercayaan' dalam masyarakat Boti sendiri juga membuktikan bahwa Teori Peran yang mengacu pada norma-norma budaya, aspek psikologis dan interaksional anggota masyarakat terbukti benar.

d. Dalam Perspektif Ketahanan Sosial

Menurut Padmiati (2013) ketahanan sosial dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu *perspektif luas* yang artinya ketahanan sosial adalah bagian integral dari ketahanan nasional bersama dengan ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Selain itu dari *perspektif sempit* yang artinya ketahanan sosial dipandang sebagai kemampuan komunitas dalam mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Tentunya pada data yang diperoleh berdasarkan komunitas (masyarakat adat) Boti kita bisa mengartikan bahwa mereka telah menampilkan kemampuan komunitas dalam menghadapi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik akibat dari pandemi Covid-19. Baik dengan memiliki kedaulatan pangan, kegiatan ekonomi yang terus berjalan, aktivitas sosial yang masih biasa terlaksana di kondisi pandemi, menaati aturan dan anjuran pemerintah di masa pandemi, dan sebagainya.

Selain itu, dalam ketahanan sosial Keck dan Sakdapolrak (2013) menyebutkan ada tiga kapasitas yang perlu dipenuhi untuk sebuah komunitas bida disebut berketahanan. Pertama adalah *coping capacities* yang merujuk pada reaktif dan *absorptive*, mengatasi ancaman langsung dengan modal sumber daya yang tersedia secara langsung. Ini ditunjukkan oleh Orang Boti dengan segera menutup perbatasan dan mereka; Kedua adalah *adaptive capacities* atau proaktif dan preventif untuk mengantisipasi risiko masa depan dan menyesuaikan modal. Orang Boti memanfaatkan kekayaan alam untuk membantu mereka dalam menghadapi pandemi, yaitu dengan menjaga kesehatan dengan dekat dengan alam; Ketiga adalah *transformative capacities* yang mencakup kemampuan untuk mengakses modal dan bantuan dari arena sosio-politik yang lebih luas. Meski Orang Boti (Dalam) menutup akses keluar masuk wilayah mereka, namun mereka masih terbuka dengan dorongan dari Lembaga AMAN yang mendorong terciptanya Lumbung Pangan bagi Orang Adat sendiri.

4.5 Pembahasan

Seperti yang telah di jelaskan dalam latar belakang penelitian bahwa kondisi pandemi memaksa banyak pihak untuk ‘merubah’ kondisinya. Tentu kita melihat bagaimana usaha pemerintah untuk menekan dampak dari pandemi ini. Namun sayangnya kadang kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga pada akhirnya masyarakat sendiri yang terdampak. Dalam penelitian yang berfokus pada masyarakat adat Boti Dalam khususnya pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana usaha Orang Boti untuk bertahan di tengah pandemi dengan kebijakan yang malah bisa mengancam masyarakat adat sendiri.

Masyarakat adat sendiri, atau masyarakat hukum adat, atau juga ada yang menyebut pribumi sesungguhnya ada jauh sebelum konsep masyarakat terbentuk. Berbagai kelompok manusia atau masyarakat adat yang telah ada ini terbentuk akibat dari usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang sampai kemudian memiliki norma-norma yang mengatur cara hidup mereka bersama. Sampai dengan pada akhirnya terbentuk pranata-pranata sosial. Seiring dengan perubahan dunia, yang Indonesia hubungan antar kelompok masyarakat yang dibawa oleh Barat dengan imperialisme dan kolonialisme, berdampak pada kelompok-kelompok atau komunitas manusia ini. Memunculkan konsepsi-konsepsi baru, yaitu negara, bangsa, masyarakat, dan yang mengikutinya (Purba, 2005, pp. 24-28; Ricklefs, 1993; Taylor, 2004, pp. 27-59).

Di benua Amerika secara luas, masyarakat adat ditunjukkan kepada kelompok dan keturunan yang mendiami wilayah tersebut sebelum kedatangan penjajah dan pemukim Eropa atau Pra-Columbus. Masyarakat adat, juga disebut sebagai orang pertama atau orang asli, yang kemudian disebut sebagai pribumi dimana dalam konteks modern, digunakan oleh Eropa untuk membedakan penduduk asli Amerika dengan orang kulit hitam (Afrika) yang dibawa sebagai budak (pertama kali digunakan dalam konteks ini oleh Sir Thomas Browne pada tahun 1646) (Eason, n.d.; Monet & Wilson,

1992). Sedang di Indonesia sendiri penyebutan masyarakat adat merujuk kepada komunitas-komunitas adat dengan hukum adat *rechtsgemeenschappen* yang merupakan populasi terbesar dari Hindia Belanda) yang ada sejak pendudukan Hindia Belanda (Firmansyah, 2019). Namun mendapat “penolakan” karena masyarakat tersebut tidak hanya menyangkut tentang hukum khusus yang mengatur komunitas mereka namun juga mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan (Tim FH UNJA, 2020). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat adat erat dengan sejarah perbudakan dan penjajahan.

Di era kontemporer, khususnya setelah masa kolonial dan imperialisme berakhir, masyarakat adat kontemporer yang masih tersisa tentu terus bertahan. Banyak populasi asli masyarakat adat mengalami penurunan dramatis, bahkan kepunahan, dan sisanya masih terancam bencana alam di berbagai bagian dunia. Ini dikarenakan masyarakat adat cenderung memiliki kondisi yang jauh dari modernisasi dunia sehingga mereka banyak tertinggal dalam pengolahan sumber daya untuk menghidupi komunitasnya. Beberapa lainnya telah berasimilasi dengan populasi lain atau telah mengalami banyak perubahan lainnya melalui migrasi, relokasi, pemindahan paksa, dan sebagainya (UN Permanent Forum on Indigenous Issues, n.d.).

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memiliki *Declaration on the Right of Indigenous Peoples* atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Ada empat “golongan” yang terbentuk dalam menanggapi deklarasi ini yang mana *pertama* mereka yang menerima dengan gembira yang merupakan masyarakat adat itu sendiri; *kedua* menolak dengan tegas yang merupakan “negara/ pemerintah” yang memiliki sejarah tidak baik dengan masyarakat adat itu sendiri. Sebagai contoh adalah Selandia Baru, Kanada, Australia, Amerika Serikat; *tiga* menolak dengan tidak tegas atau dengan alasan dan atau persyaratan; dan *empat* tidak berpendapat (Karoba, 2007, pp. 73-81).

Masyarakat Boti Dalam saat pandemi masuk ke Indonesia, 'lembaga adatnya' langsung memutuskan untuk menutup wilayah. Namun ini kemudian di pertengahan tahun pemerintah daerah meminta untuk dibuka dalam rangka penanganan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi, di saat Boti Dalam nol (0) kasus Covid-19 dengan penutupan wilayah. Pihak 'lembaga adat' maupun masyarakatnya (*toh/ too*) tentu menolak cara ini, yang kemudian menimbulkan gejolak diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah melalui diskusi dan evaluasi tentu bersama dengan bantuan lembaga non-profit (AMAN) pada akhirnya Boti Dalam tetap menutup wilayah mereka dari asing (wisatawan, peneliti, dan pihak lainnya) di luar Boti Dalam, dengan catatan petugas kesehatan, pengurus pemerintah desa dan perwakilan lembaga non-profit yang berkepentingan untuk penanganan Covid-19 masih bisa masuk. Pada akhirnya sampai dengan awal bulan Februari 2022, berdasarkan data yang diberikan oleh Puskesmas Ki'e, kasus Covid-19 di Boti Dalam masih dalam angka nol (0). Bahkan dalam data yang dikeluarkan oleh pihak BPS dan pihak lainnya, dalam bagian hasil pengumpulan data, tidak ada warga yang terkena gizi buruk dan sebagainya. Oleh karena itu sangat bisa dikatakan bahwa mereka mampu membentuk sistem pertahanan komunitas yang baik terhadap bencana (pandemi Covid-19).

Keberhasilan ini tentu diraih dengan berbagai faktor dimana salah satunya adalah dengan falsafah hidup yang masih di pegang bersama. Falsafah hidup ini yang membuat ikatan mereka kuat atau menjadi solid dalam menghadapi pandemi. Masyarakat adat di berbagai wilayah selalu dikenal dengan solidaritasnya atau dengan sifat komunitasnya yang cenderung kolektif. Tiap masyarakat adat memiliki falsafah hidup yang telah mereka lakukan ratusan bahkan ribuan tahun dan tetap mereka jaga. Solidaritas terutama solidaritas masyarakat adat sendiri telah dijelaskan oleh beberapa pihak dengan berbagai pengertian.

Kata solidaritas sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai perasaan atau sifat solider atau sifat satu rasa,

senasib atau perasaan setia kawan (KBBI Online, 2021). Sedang oleh Elliy dkk, lebih spesifik menjelaskan, solidaritas sosial adalah hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan atas faktor perasaan, moral serta kepercayaan yang telah diyakini bersama, kemudian diperkuat oleh pengalaman-pengalaman emosional. Perasaan dalam hubungan sosial ini menghasilkan semangat kebersamaan, yang mana solidaritas sosial dibutuhkan untuk mendorong pemecahan masalah/ konflik/ sengketa yang dihadapi komunitas (Elliy et.al, 2006, pp. 86-87).

4.5.1 Merajut Solidaritas ala Orang Boti di Masa Pandemi

Pertahanan komunitas atau juga di ketahanan sosial oleh Achwan (2002) dijelaskan bahwa ini dekat dengan apa yang disebut sebagai modal sosial (*social capital*) yang terdiri dari aspek organisasi sosial, seperti norma, jaringan sosial, dan kepercayaan sosial yang mendorong tindakan kolektif untuk mencapai tujuan dan manfaat bersama. Orang Boti Dalam sudah sangat terbukti memiliki modal sosial tersebut dimana norma dan kepercayaan mengikat mereka sampai dengan terbentuknya sikap kolektif-positif dalam menanggapi berbagai masalah dan tantangan sejak ribuan tahun lalu.

Dalam konteks yang sama Makmur Sanusi mendefinisikan modal sosial sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat sehingga dapat membuat orang bekerja sama (*connectedness*) untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Narayan dan Woolcock mendefinisikan lebih sederhana dengan meyakini bahwa norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang mau bertindak secara kolektif (Nuryana, 2002).

Tentunya sikap kolektif yang sangat solid hanya bisa terbangun dengan kepercayaan, jaringan, nilai, dan tentunya komitmen yang kuat di antara Orang Boti Dalam itu sendiri yang dirawat sejak ribuan tahun lalu. Sebagaimana Bahri et.al (2002) menjelaskan bahwa modal sosial

memberikan kontribusi penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan terbentuknya unsur-unsur kepercayaan (*trust*), jaringan (*networking*), nilai (*value*), dan komitmen.

Orang Boti yang kosmosentris membuat mereka hidup berdampingan bukan hanya dengan sesama manusia, namun juga dengan alam, karena adanya 'tuntutan' untuk mewujudkan keselarasan dan hidup saling membutuhkan, harmoni yang seimbang dengan alam dari apa yang menjadi kepercayaan mereka. Oleh karena itu Orang Boti sangat erat dengan nilai-nilai atau norma tradisi sejak ribuan tahun lalu yang diturunkan secara lisan.

Ini sama halnya dengan yang terjadi pada masyarakat adat Totonac yang juga kaya akan budaya adat yang dimanifestasikan dalam sistem kepercayaannya, nilai-nilai, dan tradisi yang mereka anut. Bahkan karena mereka melakukan kampanye dan konservasi strategi agro-produktif melalui tarian, festival keagamaan, dan ritual. Mereka bisa membuka jalan untuk transformasi 'wilayah' dan gerakan mereka sendiri. Dari wilayah yang terpinggirkan-termarginalkah ditambah atribut-atribut yang cenderung negatif, ini menjadi suatu potensi untuk mengenalkan mereka ke cakupan lebih luas (global) (Lugo-Morin, 2021). Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi Orang Boti Dalam agar mereka bisa memenuhi ketahanan sosial dengan kemampuan transformatif tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang telah di jaga ribuan tahun.

Seperti yang penulis jelaskan bahwa keberhasilan Orang Boti salah satunya adalah didasari oleh solidaritas yang terbangun dengan baik berdasar ikatan darah dan falsafah hidup yang terus diyakini. Namun selain itu, keberhasilan untuk bertahan juga karena Orang Boti masih bertahan di tanah yang merka tinggali. Hubungan Orang Boti dengan tanah yang ditempati sejak dahulu kala telah terbentuk sedemikian rupa sehingga ada ikatan jasmani dan spiritual diantara keduanya. Mereka percaya bahwa bencana/ kerusakan kepada alam/ manusia pasti dikarenakan oleh ulah manusia itu sendiri (baik Orang Boti maupun bukan). Sehingga mereka

lebih mendekatkan diri/ kembali, menjaga, dan memperbaiki alam dengan cara mereka. Seperti halnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Vieira dalam *Indigenous Perspectives of Resilience: Strength and Adaptive Strategies* yang menjelaskan bahwa masyarakat adat memang memiliki keterikatan fisik, emosional, dan spiritual dengan tanah yang mereka tinggali. Ketahanan masyarakat adat terhadap 'bencana' dapat dicapai dengan adanya *access to land and territories; the protection of nature; medical practices that allow for indigenous cultural values; education that revitalizes indigenous language, culture, and traditions; dan recognition of indigenous people contributions to Western people*. Dijelaskan oleh Antuñano dan Vieira yang mengambil studi kasus Orang Kikuyu, di Kenya, bahwa Orang Kikuyu memiliki ikatan kuat dengan tanah atau wilayah tinggal mereka. Orang Kikuyu masih terus menghidupkan cara-cara mereka bertahan hidup dengan menurunkannya ke anak-anak mereka dan mengenalkannya ke dunia. (Yadeun-Antuñano & Vieira, 2018).

Hal yang sama juga penulis temukan pada Orang Boti dimana mereka sejak dahulu telah hidup berdampingan dengan alam, wilayah tinggal mereka berada di hutan. Orang Boti Dalam masih sangat terikat dengan tanah yang mereka tinggali. Untuk kebutuhan makan mereka masih mengandalkan alam baik itu dengan bertani/ ladang maupun berternak. Tanaman yang mereka andalkan adalah jagusng, ubi-ubian, kacang-kacangan, kelapa, tebu, asam, pepaya, sayur kumbang, pitcai, jeru, nanas, dan lainnya yang kuat di tanah kering/ tandus. Mereka juga mengandalkan obat-obatan dari pohon-pohon tertentu di hutan. Bahkan untuk membangun rumah/ tempat berteduh semuanya juga berasal dari alam. Ketika terjadi bencana alam sebut saja seperti longsor yang terjadi di hutan dan mengancam mereka, Orang Boti langsung mendiskusikan dan mencari jalan keluar untuk ini, dan mereka kemudian melakukan reboisasi dengan bersama seluruh Orang Boti tanpa terkecuali. Terbukti kini hutan Boti telah pulih setelah bencana tersebut. Semua ini dilakukan oleh Orang Boti bukan

hanya sekedar secara fisik dilakukan, namun juga terdapat ritual-ritual yang dilaksanakan dari tiap kegiatan yang akan mereka lakukan.

Pada tulisan yang sama Monica dan Vieira juga menjelaskan bagaimana Orang Kikuyu juga menghadapi masalah yang sama ketika mereka mengalami degradasi lingkungan karena deforestasi untuk pengembangan Kenya. Yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan prinsip hidup Kikuyu *serudj-ta*, melakukan perbaikan, memperbarui, dan–nantinya–memulihkan dunia. Dari sini mereka kemudian memulai gerakan untuk menanam pohon berdasarkan pengetahuan asli Kikuyu dan pada akhirnya tidak hanya mengembalikan kesehatan ekosistem namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kikuyu (Yadeun-Antuñano & Vieira, 2018).

Selain itu mereka bisa menekan terjadinya konflik dari dalam akibat pandemi juga dengan sikap mereka yang solid, tolong menolong. Mereka tidak pernah membiarkan warga/ tetangga tidak makan, tidak bekerja. Jika salah satu warganya lapar dan tidak bisa makan akibat satu dan lain hal, warga lainnya akan datang membawakan bahan/ makanan yang mereka punya atau mereka akan mengambilkan dari ladang/ gudang bersama.

Pada penelitian lainnya terhadap masyarakat adat, yang ditulis oleh Hasbullah dengan judul REWANG: Kearifan Lokal dalam Membangun Solidaritas dan Integrasi Sosial Masyarakat di Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa ada yang disebut sebagai budaya Rewang yang dilakukan oleh orang-orang di Desa Bukit Batu. Dimana budaya ini tidak hanya mampu mengatur perilaku sosial anggotanya, tetapi memiliki nilai-nilai yang menciptakan ikatan moril di dalam masyarakat. Nilai-nilai solidaritas tergambar nyata dalam tradisi *rewang* milik orang Bukit Batu. Ada perasaan senasib sepenanggungan yang tercipta sehingga mereka saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan tentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Bahkan dengan adanya tradisi ini orang Desa Bukit Batu tidak membedakan antara penduduk tempatan dengan pendatang (Hasbullah, 2012).

Sama halnya dengan yang peneliti temukan dalam penelitian terhadap Orang Boti yang sangat toleran dan selalu berusaha memahami orang lain. Mungkin Orang Boti tidak memiliki sebutan khusus seperti *rewang* dalam hal tolong-menolongnya. Namun yang jelas mereka, Orang Boti selalu melakukan tolong menolong dan bersinergi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup orang-orang mereka terutama di Boti Dalam. Seperti halnya ketika mereka mau menanam atau pun memanen, melakukan perbaikan-perbaikan lahan, rumah, atau aliran air, dan sebagainya. Bahkan meski beberapa pihak menyebut 'patriarki' di Orang Boti Dalam masih tinggi, namun dalam praktiknya mereka tidak berfikir atau merasa demikian. Perempuan-perempuan Boti diperkenankan untuk membantu dalam urusan pekerjaan (tani, ladang).

Masih berhubungan dengan tolong-menolong dan atau solidaritas, Boti juga memiliki cara tersendiri dalam menghadapi gagal panen maupun paceklik. Orang Boti memiliki (atau membuat) ladang kelompok yang disebut dengan *lene kolestif* yang pengerjaannya dilakukan bersama-sama. Saat masa panen tiba hasil panen dari ladang bersama ini biasanya disimpan di *ume kbubu* (gudang pangan/ lumbung pangan) yang juga milik bersama. Hasil panen yang di simpan ini nantinya akan digunakan jika ada masyarakat yang mengalami gagal panen atau juga digunakan untuk konsumsi bersama saat dilakukan musyawarah maupun upacara/ ritual (Pradana dan Damayanti, 2019). Sistem ketahanan pangan ini juga dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga di dukung dengan program Lumbung Pangan oleh Lembaga non-profit, AMAN.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Komang Suarsana dalam Ketahanan Pangan Berbasis Adat (tantangan Penanganan Covid-19 di Bali) hal ini juga dilakukan oleh masyarakat adat di Bali yang membuat atau memiliki Tim Lumbung Pangan dengan pilar utamanya adalah *subak* yang merupakan hukum adat yang berkembang menjadi organisasi pengusaha tanah, lalu berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga atau rumah tangga serta daerah.

Sedang pada penelitian lainnya tentang bagaimana cara pertahanan masyarakat adat untuk 'menolak' Covid juga dilakukan dengan cara menutup berbatasan, melarang keluar masuknya penduduk ke wilayah mereka. Menurut Artajaya dan Wiasta (2020) dalam Desa Adat Menjadi Benteng Terakhir dalam Memutus Penyebaran Covid-19 Studi pada Desa Adat Tegallalang Gianyar Bali, mereka bahkan membuat perarem dengan melakukan penjagaan yang sangat ketat pada pintu masuk desa adat. Penjagaan terhadap masyarakat keluar masuk desa Tegallalang diperketat dan dilakukan pengecekan terkait Covid-19, pendataan terhadap rumah *kost-kostan*, dimana penghuni kost diperkenankan untuk pulang ke asalnya, tetapi tidak diizinkan untuk kembali ke desa sebelum situasi kembali normal. Ketentuan tersebut terbukti efektif karena sampai dengan penelitian dilakukan (Juni 2020) tidak ada warga desa adat yang terdampak Covid-19.

Contohnya lainnya disebutkan oleh Cali Tzay, yang melaporkan bahwa beberapa masyarakat adat dari Kanada melakukan penutupan perbatasan wilayah mereka dan berhasil menghentikan Covid-19. Situasi yang sama juga terjadi di beberapa bagian hutan Amazon yang mana terdapat beberapa komunitas lokal yang tidak memiliki satu kasus Covid-19 (OHCHR, 2021). Hal yang sama juga dilakukan Orang Boti ketika pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dimana mereka meminta rakyatnya untuk menutup pintu dan atau perbatasan, tentu ini merupakan langkah yang baik dan sangat tepat.

4.5.2 Ketahanan Sosial Masyarakat Adat dalam Rangka Menghadapi Potensi Konflik akibat Pandemi

Respon cepat untuk menangani penyebaran Covid-19 juga datang dari masyarakat adat Badui, Banten yang melakukan penguncian, memperketat pintu masuk ke wilayah mereka. Sehingga masyarakat adat Badui bisa melewati gelombang pertama Covid-19 hingga awal Juni 2020.

Sama dengan masyarakat adat Dayak, sebagian dari masyarakat adat Badui yang memiliki tradisi berburu dan meramu masuk ke hutan untuk bertahan hidup (Arif, 2021).

Gubernur Papua Lukas Enembe juga memberikan respon cepat atas wabah ini dengan menutup pintu masuk ke Papua pada 24 Maret 2020. Sangat disayangkan strategi ini dianggap bertentangan dengan metode penanganan pandemi pemerintah pusat sehingga kemudian dilonggarkan. Akibatnya Papua menjadi salah satu episentrum wabah Covid-19 di Indonesia (Arif, 2021). Salah satu yang terbaik adalah datang dari masyarakat Bali dimana mereka bisa menekan korban terinfeksi dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adatnya yang diakui (CNN Indonesia, 2020a).

Dalam konteks pandemi, menurut laporan AMAN, bahwa mereka telah memberikan instruksi yang jelas kepada masyarakat adat untuk memperhatikan pandemi Covid-19 dan melaksanakan protokol kesehatan, dan masyarakat adat telah melaksanakan instruksi dengan baik. Lebih dari sekedar melakukan proteksi menggunakan cara mereka, beberapa masyarakat adat juga mampu mengembangkan tim-tim tanggap bencana dan bahkan membangun kedaulatan pangan mereka sendiri (AMAN, 2020, pp. 39-41).

Sama seperti masyarakat lainnya, masyarakat Boti memiliki keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas mereka dalam membangun ketahanan sosial. Mereka memiliki prinsip hidup sederhana yang ini diterapkan bukan hanya kepada kebutuhan tersier namun juga kebutuhan pokok seperti makan dan pakaian. Orang Boti juga membudayakan saling bantu dan melengkapi bukan hanya dalam kelompok terkecil/ keluarga, namun juga kepada sesama. Mereka juga memiliki pandangan yang baik tentang etika bekerja, bahwa bantuan gratis akan memanjakan mereka, sehingga Orang Boti terbiasa untuk bekerja keras demi mencukupi kebutuhan pokok mereka. Sehingga pada akhirnya mereka tidak

membutuhkan bantuan/ santunan seperti beras miskin (raskim) dari pemerintah (Mailani, 2021, pp. 14-16).

Jika dilihat dari bagaimana beberapa masyarakat ada yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Sangat disayangkan jika kemampuan mereka tidak 'dimanfaatkan' oleh pemerintah setempat. Ini merupakan potensi yang baik terutama bagi Indonesia yang kurang lebih memiliki 70 juta masyarakat adat yang terbagi menjadi 2371 komunitas adat yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Komunitas adat terbanyak berada di Kalimantan dengan jumlah mencapai 772, kemudian disusul Sulawesi dengan 664 komunitas, Sumatera mencapai angka 392, Bali dan Nusa Tenggara 253 komunitas adat, Maluku 176, Papua 59 komunitas, dan Jawa dengan 55 komunitas Adat. Lebih dari itu, seluruh komunitas adat ini tergabung dalam AMAN (Andriarsi, 2020).

Keberadaan masyarakat adat selalu dinomor dua kan dan dianggap masyarakat yang terbelakang dan tertinggal, tidak memiliki pengakuan formal atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka tinggali puluhan tahun. Selain itu mereka juga masih terus menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal, menikmati akses penunjang kehidupan lainnya termasuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan (World Bank, 2021).

Hal ini mengakibatkan wilayah gerak masyarakat adat sangat sempit dan kerap menjadi korban utama dalam tiap isu yang ada akibat 'keterbelakangan' dan 'ketertinggalan' mereka. Seperti pada kondisi pandemi Covid-19, yang sesungguhnya mekanisme bertahan hidup mereka patut dijadikan contoh dan model. Dan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh masyarakat adat ini justru akan melemahkan negara itu sendiri. Dengan memanfaatkan 'kemandirian' orang adat mereka justru bisa menekan terjadinya konflik-konflik dalam hubungan sosial. Mereka tidak pernah menolak keberadaan pemerintah jika memang kebijakan yang di buat untuk kebaikan bersama, bukan mewujudkan kepentingan beberapa pihak.

4.5.3 Tantangan yang Dihadapi Orang Boti

Meskipun peneliti menemukan bahwa hal-hal dalam indikator ketahanan sosial menjurus pada kemampuan Orang Boti untuk memenuhinya, namun masih banyak hal menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat, daerah, lembaga on-profit, maupun Orang Boti Dalam sendiri. Seperti saat kita merujuk pada penelitian terdahulu *The Foundation of Indigenous Resilience: The Interconnection with the Land* dimana menjelaskan adanya koneksi antara tanah ditinggali dengan masyarakat-(adat)-nya (Yadeun-Antuñano & Vieira, 2018). Ini sama halnya yang terjadi di Boti Dalam dimana mereka juga memiliki hambatan dalam masalah kepemilikan tanah adat mereka. Hidayat (2022) mengatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pemerintah terkait akhirnya membatasi ruang gerak Orang Boti terutama pada isu politik. Mereka sulit untuk memberikan hak pilihnya karena tidak memiliki kartu tanda penduduk, yang artinya untuk akses kesehatan, pekerjaan, jaminan keselamatan dan sebagainya juga ikut terbatas.

Tidak dimilikinya KTP oleh beberapa Orang Boti dikarenakan rumah mereka berada di kawasan 'hutan milik negara' yang mana tidak boleh ada pemukiman atau kegiatan diluar pengetahuan pemerintah. Bahkan kemudian mereka bisa terancam tergusur kapan saja akibat ekspansi industri maupun pembukaan lahan lainnya untuk kepentingan pemerintah. Tentunya situasi ini kontradiktif dengan konsep keamanan manusia pun dengan keamanan nasional itu sendiri. Dimana tanda kependudukan merupakan hal penting dalam hidup bernegara karena ini merupakan identitas kita sebagai penduduk di negara tersebut, sehingga kita bisa menuntut hak-hak sebagai warga negara.

Walters et.al dalam tulisannya juga mengatakan bahwa masyarakat adat dan beberapa komunitas lokal lainnya memiliki hubungan yang berbeda dengan lingkungan atau wilayah atau tanah yang mereka tinggali.

Ini adalah hal yang sangat fundamental bagi kehidupan sosial, budaya dan spiritual mereka. Mereka memiliki budaya dan hukum berdasarkan timbal balik antara mereka (manusia) dan tanah (alam) tempat tinggal mereka, juga prinsip-prinsip untuk generasi mendatang. Ilmu pengetahuan (tentang hidup), hukum dan prinsip adat yang telah turun menurun sejak ribuan tahun menjadi landasan dari praktik pengelolaan masyarakat adat. Ini termasuk berkaitan dengan hak bersama atas tanah, laut dan sumber daya alam lainnya. Praktik-praktik ‘tradisional’ ini bertahan lama, tersebar luas, beragam dan dinamis, memiliki banyak manifestasi dan nama yang berbeda secara global (Walters et al.,2021).

Salah satu cara agar masalah ini selesai adalah dengan melakukan advokasi kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan pengakuan adat. Meski hubungan antara Orang Boti dan pemerintah daerah pun pusat, baik, namun kejelasan akan tanah dan kewarganegaraan perlu ditegaskan. Sayangnya, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa Orang Boti Dalam maupun Luar tidak memiliki lembaga adat yang terstruktur layaknya Dayak, Baduy, maupun lainnya. Jika melihat pada suku Dayak yang memiliki Dewan Adat Dayak, *Borneo Dayak Forum* sangat membantu dalam mengadvokasi lebih dan mempromosikan agenda-agenda dari masyarakat adat itu sendiri dengan lebih vokal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terputusnya generasi ‘penerus’ Orang Boti Dalam. Ini diakibatkan beberapa hal fundamental. Perginya Orang Boti Dalam akibat mencari pendidikan dan transmigrasi dalam rangka mencari pekerjaan membuat mereka enggan untuk kembali Ke Boti Dalam. Ini juga diakibatkan karena terkikisnya wilayah adat yang mengakibatkan terbatasnya ketersediaan pangan, pekerjaan, dan tempat tinggal itu sendiri.

Pada akhirnya komunitas masyarakat adat yang berhasil melawan pandemi COVID-19 dengan mandiri adalah mereka yang telah mencapai otonomi dan pemerintahan sendiri, sehingga sangat memungkinkan untuk mereka dalam pengelolaan wilayah mereka termasuk sumber daya

alam dan manusia. Dengan begitu komunitas ini bisa memastikan terjadinya ketahanan pangan melalui produksi dan konsumsi secara 'tradisional' (Cali Tzay, 2020). Dimana yang dimaksud adalah produksi dan konsumsi seperti tanaman, sayur untuk makan, kayu-kayu dari pohon untuk tempat tinggal, sampai obat-obatan.

Cali Tzay pada kesempatan lain juga mengatakan bahwa sangat penting untuk menyusun tindakan dan atau tanggap bencana dan pemulihan negara dilakukan dengan mendahulukan, persetujuan, dan menginformasikan kepada masyarakat adat. Ini dikarenakan mereka komunitas yang paling rentan terkena dampak namun dengan begitu mereka juga bisa tanggap akan perubahan sosial ini di komunitas mereka sendiri (OHCHR, 2021).

Sedangkan hal ini masih menjadi tantangan besar bagi mayoritas komunitas lokal atau masyarakat adat itu sendiri. Mereka perlu untuk mengartikulasikan, mengadvokasikan hal ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ini masih menjadi masalah karena keterbatasan mereka dalam memiliki dan atau mencapai para advokat.